

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS KESALAHAN PROSEDUR OLEH PIHAK KEPOLISIAN YANG MENYEBABKAN KORBAN SALAH TANGKAP (*ERROR IN PERSONA*) DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN ( Studi Polres Lampung Utara )**

**Oleh**

**ARSAEL JASOND DICKWAHYUDI SIANTURI**

Kesalahan prosedur oleh pihak kepolisian dalam menetapkan tersangka menyebabkan munculnya korban salah tangkap yang merugikan tidak hanya kepada masyarakat atau orang yang tidak bersalah melainkan juga kepada nama baik institusi yaitu Kepolisian. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu Bagaimana prosedur pihak Kepolisian dalam menetapkan tersangka dalam tindak pidana pembunuhan dan Bagaimana akibat hukum terhadap pihak kepolisian yang menyebabkan salah tangkap dalam suatu tindak pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis Normatif dan yuridis empiris yaitu pendekatan yang didasarkan pada perundang-undangan, teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penulisan penelitian berupa asas-asas, nilai-nilai, serta dilakukan dengan mengadakan penelitian lapangan, data terdiri dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder yang kemudian di analisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan, prosedur yang dilakukan Penyidik Reskrim Polres Lampung Utara dalam menetapkan tersangka tindak pidana pembunuhan seharusnya mengikuti Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penetapan tersangka berdasarkan bukti permulaan yang cukup minimal dua alat bukti sebagaimana termuat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Alat bukti ditentukan melalui gelar perkara dan keyakinan Penyidik yang secara objektif mendasarkan alat bukti tersebut telah terjadi tindak pidana. Akibat hukum terhadap penyidik Reskrim Polres Lampung Utara dalam hal terjadinya salah tangkap atau *error in persona* berupa penjatuhan sanksi pidana jika penyidik dalam melakukan upaya paksa terhadap tersangka menimbulkan pelanggaran terhadap hak rasa aman dan perlindungan dari ancaman

## **ARSAEL JASOND DICKWAHYUDI SIANTURI**

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi dan Selain itu diberi sanksi pelanggaran kode etik jika penyidik dalam wewenangnya melanggar atas hak warga negara berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang.

Saran dalam penelitian ini adalah Kepolisian dalam menetapkan tersangka agar mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan, supaya tidak menghilangkan rasa percaya masyarakat terhadap kredibilitas polisi dalam memberi jaminan kepastian hukum terhadap masyarakat. Pentingnya Penegakan hukum pidana yang tegas dan pemberian sanksi terhadap oknum polisi dalam hal terjadinya salah tangkap bukan hanya peraturannya tetapi dalam penerapan juga.

**Kata Kunci : Kesalahan Prosedur, Korban Salah Tangkap, Kepolisian**

## **ABSTRACT**

### **ANALYSIS OF PROCEDURAL ERROR BY THE POLICE THAT CAUSED THE VICTIM TO BE WRONGLY ARRESTED (*ERROR IN PERSONA*) IN THE CRIME OF MURDER ( North Lampung Police Research)**

**By**

**ARSAEL JASOND DICKWAHYUDI SIANTURI**

Procedural errors by the police in determining the cause of the emergence of only victims of wrong arrests who are detrimental do not harm the community or innocent people as well as to the police. The problems in this study are how the police procedure in determining the suspect in the crime of murder and how the legal consequences to the police that cause wrong arrests in a crime.

This study uses a normative juridical approach and an empirical juridical approach, namely an approach based on legislation, theories and concepts related to research writing in the form of principles, values, and is carried out by conducting field research, namely with facts. which is in the source, the data consists of field data and library data. The types of data include primary data and secondary data which are then analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show that the procedure carried out by the Criminal Investigation Unit of the North Lampung Police in determining the suspect in the crime of murder should follow the Regulation of the National Police Chief No. 12 of 2009 concerning Supervision and Control of the Handling of Criminal Cases within the Indonesian National Police based on sufficient initial evidence of at least two pieces of evidence as contained in Article 184 of the Criminal Procedure Code. The evidence is determined through the title of the case and the investigator's conviction which objectively bases the evidence on a criminal act. The legal consequences for North Lampung Police Criminal Investigation Unit investigators in the event of a wrong arrest or error in persona in the form of imposing criminal sanctions if the investigator makes coercive efforts against the suspect cause a violation of the right to a sense of security and protection from the threat of fear to act or Not to act which is a human right. In the form of sanctions for violating the code of ethics if the investigator in his authority violates the rights

**ARSAEL JASON DICKWAHYUDI SIANTURI**

of citizens, it is directly related to the abuse of authority by members of the Police who are prohibited.

The suggestion in this study is that the Police in determining suspects must follow the procedures established by the legislation, so as not to lose public confidence in the credibility of the police to guarantee legal certainty or provide legal protection to the community. The importance of strict criminal law enforcement and the imposition of sanctions on police officers in the event of wrongful arrests is not only the rule but also in its application.

**Keywords: Procedural Error, Victim Wrong Arrest, Police**